



**PROGRAM BANTUAN PEMULIHAN AWAL (ERA)
UNTUK YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH:**

**PERMOHONAN PROPOSAL HIBAH MINI UNTUK MENDANAI KEGIATAN SHELTER
YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY ORGANIZATION)**

Latar Belakang

Program Bantuan Pemulihan Awal (ERA, Early Recovery Assistance) untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah, sebuah kerja sama antara BAPPENAS dan UNDP, mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat madani lainnya (CSO, *civil society organization*) (termasuk perguruan tinggi) untuk mengajukan usul-usul prakarsa berbasis masyarakat yang bertujuan menyediakan hunian atau struktur atap kepada keluarga-keluarga korban Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Semua prakarsa akan didanai oleh dana ERA dengan jumlah maksimal Rp250.000.000 untuk tiap prakarsa. Kegiatan mesti telah rampung selambat-lambatnya enam (3) bulan setelah penyerahan. Tanggal pengajuan permohonan dana adalah **Jumat, 20 Oktober 2006, pukul 17:00 WIB**.

Informasi Latar Belakang

Pada 27 Mei 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terdapat 5.778 korban tewas dan masyarakat pengungsi diperkirakan mencapai 600.000 jiwa. Diperkirakan 139.859 rumah mengalami kerusakan berat dan 468.149 yang mengalami kerusakan sedang dan ringan.

Pada 3 Juli 2006 Presiden Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya fase tanggap darurat dalam rangka gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006. Pemerintah telah merumuskan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi. Rencana aksi memuat tiga unsur: (1) Pemulihan perumahan dan permukiman; (2) Pemulihan infrastruktur umum; dan (3) Pemulihan ekonomi.

Program ERA untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan kemitraan di antara BAPPENAS, pemerintah daerah DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta UNDP. ERA dirancang untuk menggalakkan pemulihan awal pascabencana dan untuk menjadi mata rantai yang krusial di antara kebutuhan hunian jangka pendek serta rekonstruksi hunian dan sumber penghidupan jangka panjang.

Tujuan Program Dana Hibah

Melihat betapa besarnya lingkup kerusakan yang terjadi pada sektor hunian, maka sudah dimaklumi bahwa akan dibutuhkan beberapa tahun untuk melakukan rekonstruksi perumahan permanen, dan bahwa hunian selama periode rekonstruksi mesti berupa struktur yang lebih baik daripada tenda. Pemda Jawa Tengah dan DIY mengetahui perlu adanya semacam hunian sementara seperti "struktur atap" (lihat Kerangka Strategis untuk Kegiatan Rekonstruksi yang dilampirkan sebagai Lampiran 1) yang dibangun secara gotong royong. Di sini dipertimbangkan beberapa opsi. Pilihan yang berlaku sekarang adalah menyediakan alat-alat, paket BBR, dan pendampingan teknis sehingga kelompok-kelompok keluarga dapat membangun hunian individual di atas lahan bekas rumah mereka dulu berdiri. Fakultas Arsitektur dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, misalnya, telah menyiapkan pelbagai prototipe hunian sementara yang menggunakan terpal sebagai atap dan struktur yang dibangun dengan bambu atau kayu. Satu hal

yang mesti diperhatikan adalah dibutuhkannya hunian yang dapat merangkap sebagai tempat kerja bagi mereka yang sebelumnya menyelenggarakan industri rumah tangga. Program ERA akan membantu Pemerintah dalam menentukan opsi persyaratan bantuan struktur atap, serta mempercepat proses rekonstruksi perumahan Pemerintah.

Lingkup Kegiatan

Pemerintah Indonesia sedang menyusun rencana untuk membantu semua korban gempa bumi dalam membangun kembali rumah mereka. Terlepas dari hal ini, tetap perlu disediakan struktur atap sebelum musim hujan tiba kepada mereka yang sekarang belum memiliki hunian layak. Gugus Hunian dan Rekonstruksi yang difasilitasi PBB telah merumuskan pedoman rinci mengenai desain dan pelaksanaan struktur atap yang diterbitkan dalam 'Kerangka Strategis untuk Kegiatan Rekonstruksi' (Lampiran 1). Spesifikasi dan kriteria desain tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Teknis Baku

Spesifikasi	Standar
Ruangan dalam rumah	Setidaknya 4,5m ² per orang, denah lantai seluas 18m ² untuk lokasi yang dibatasi lingkungan dan 24m ² untuk yang tidak dibatasi lingkungan
Ventilasi dan suhu udara	Desain hunian mesti memiliki ventilasi yang memadai, dan meminimalkan suhu dalam ruangan
Perlindungan dari cuaca	Desain hunian mesti memberikan perlindungan terhadap hujan, termasuk air hujan yang tertiuap angin
Tinggi atap	Minimal 2 meter dari permukaan tanah sampai lis
Keawetan	Bahan bangunan dan konstruksi mesti dapat digunakan selama 24 bulan
Keleluasaan pribadi	Setidaknya ada satu partisi yang menciptakan setidaknya dua ruangan
Keselamatan	Konstruksi hunian mesti tahan terhadap angin kencang dan gempa bumi
Desain atap	Desain atap bergenteng
Fleksibel/ efisien	Sedapat mungkin bahan bangunan mesti dapat digunakan kembali
Pertimbangan budaya dan iklim	Bahan bangunan dan teknik pembangunan yang dipakai sudah dikenal oleh penerima manfaat
Lokasi	Hunian sementara mesti dibangun di atau sekitar pekarangan rumah
Kesehatan masyarakat – pembuangan air	Tempat pembuangan air dan konstruksi lantai yang memadai guna meminimalkan risiko banjir
Partisipasi masyarakat	Pembangunan dilakukan secara gotong royong
Ramah lingkungan	BBR mesti berasal dari sumber yang ramah lingkungan
Kepatuhan terhadap standar minimum bantuan kemanusiaan	Mematuhi atau menyediakan fasilitas yang lebih baik daripada standar SPHERE untuk pengadaan hunian sementara ¹
Rentang biaya unit per unit Hunian ²	Rp1-2 juta (USD110-220). Perhatikan bahwa karena jumlah maksimum dana hibah adalah Rp250 juta, maka diperkirakan bahwa tiap dana hibah dapat mengakomodasi sebanyak maksimal 125-250 unit hunian
Biaya minimum BBR (termasuk <i>toolkit</i>) per unit hunian	80% dari Biaya Unit

Penerima Manfaat Sasaran

Penerima manfaat sasaran pada program ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi korban langsung gempa bumi di daerah DIY dan Jawa Tengah. Hibah kecil mesti memfokus pada daerah-

¹ 'Standar SPHERE' adalah sebuah dokumen konsensus yang memuat tolok ukur dan indikator terkait respons kemanusiaan dan sudah diterbitkan oleh IFRC.

² Biaya unit diturunkan dari biaya total (termasuk bahan dasar, alat dan peralatan, tenaga kerja, kegiatan pendukung dan overhead) yang dibagi dengan target jumlah total keluaran).

daerah yang mengalami tingkat kerusakan yang lebih besar dan/ atau bantuan yang kurang. Kelompok-kelompok rentan tertentu, seperti penyandang cacat atau yang sakit, rumah tangga yang dikepalai perempuan, mesti mendapat prioritas.

Organisasi yang berminat mesti menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait ihwal penyeleksian penerima manfaat. Data primer mengenai penerima manfaat sasaran mesti diketahui oleh pemerintah desa dan kecamatan, untuk kemudian dikoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten.

Usul mesti menyebutkan lokasi geografis dari penerima manfaat yang disasar lewat hibah, jumlah penerima manfaat, dan pemikiran di balik terpilihnya penerima manfaat. Perhatikan bahwa karena jumlah maksimum dana hibah adalah Rp250 juta, dan karena prakiraan biaya unit per hunian adalah Rp1-2 juta, maka diperkirakan bahwa tiap dana hibah dapat mengakomodasi sebanyak maksimal 125-250 unit hunian.

Lantaran singkatnya jadwal kegiatan (paling lama 3 bulan), maka lembaga mesti mengusulkan jumlah hunian yang dapat dikerjakan dalam kurun waktu tersebut saja.

Mekanisme Penyaluran Dana Hibah

Organisasi-organisasi yang lolos seleksi akan menerima dana hibah, dan bertanggung jawab atas penyaluran dana yang efektif pada penerima manfaat, yang melingkupi proses pengadaan dan distribusi bahan bangunan, dan pendampingan teknis langsung pada penerima manfaat selama kegiatan konstruksi.

Lembaga Sasaran

Dari sudut pandang implementasi, program dana hibah ini menysasar LSM maupun CSO lainnya (termasuk perguruan tinggi), dan lembaga swasta yang berlokasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan bantuan hunian sementara dengan menggunakan pendekatan gotong royong. Idealnya, program akan mendukung lembaga-lembaga setempat yang memang sudah aktif menyelenggarakan program tanggap darurat dan/ atau proyek yang dikoordinasi oleh Gugus Hunian PBB.

Lembaga yang berminat diminta untuk menyerahkan usul beserta dokumen pelengkap lainnya yang disyaratkan (*format dalam Lampiran 2*).

Komponen Biaya yang dapat Didanai

Semua biaya langsung yang berkenaan langsung dengan implementasi kegiatan-kegiatan di atas berkemungkinan untuk didanai. Semua biaya langsung mesti secara langsung berkaitan dengan implementasi kegiatan. Biaya-biaya tersebut meliputi:

1. Biaya langsung yang berkaitan dengan masukan proyek, seperti biaya bahan bangunan hunian, peralatan dan perkakas, biaya perbaikan atau renovasi, biaya pelatihan, dsb. Perhatikan bahwa Biaya Minimum Bahan Bangunan (termasuk Bahan Bangunan Hunian/ Atap, Toolkit, dan Peralatan) tidak boleh lebih kecil daripada 80% dari jumlah total usul.
2. Biaya langsung yang berkaitan dengan dukungan lembaga untuk melaksanakan kegiatan, seperti pengawakan, biaya transportasi dan monitoring, dan biaya kantor yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Selain biaya langsung, program dana kecil akan mendukung "biaya tak langsung" (biaya overhead) dalam jumlah yang tidak melebihi 5% dari nilai proposal. "Biaya tak langsung" adalah pengeluaran administrasi sebuah perusahaan/ lembaga yang terus berjalan yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh proyek, dan oleh karena itu dinyatakan dalam % dari nilai total proposal alih-alih diperinci dalam satuan-satuan biaya.

Jadwal Kegiatan Pemrosesan Proposal

6-20 Oktober 2006	Pengumuman (undangan mengajukan proposal, undangan lokakarya)
14 Oktober 2006	Lokakarya untuk lembaga-lembaga yang berminat yang akan diadakan di Ruang Radio Suyoso, Bappeda DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta
20 Oktober 2006	Tenggat pengajuan proposal (lihat keterangan di bawah ini)
Minggu ke-4 Oktober	Evaluasi usul-usul
Minggu ke-1 November	Balikan kepada lembaga-lembaga yang direkomendasi; revisi proposal (jika perlu); pemberian perjanjian hibah
3 bulan sejak penyerahan dana hibah	Pelaksanaan kegiatan

Pengajuan Proposal

Usul dapat diajukan dengan menggunakan lembar isian permohonan dana yang berbahasa Inggris atau Indonesia yang terdapat pada Lampiran. Usul mesti sudah diterima oleh ERA Programme Office **paling lambat pada Jumat, 20 Oktober 2006 pukul 17:00 WIB**. Usul dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Email (lebih disukai) u/p: shelter.id@undp.org; atau
- (b) Per pos atau diserahkan langsung u/p: ERA Shelter Mini Grant
ERA Project Office
UN Coordination Office
Gedung Ditiasa
Jl. Ringroad Barat – Nogotirto
Gamping, Sleman, DIY

Mohon dimaklumi bahwa semua proposal yang diterima UNDP setelah lewat batas waktu yang ditentukan akan ditolak. Mengingat jeda waktu yang dibutuhkan dari mulai email dikirim sampai diterima, terutama jika email tersebut memuat banyak informasi, kami menyarankan semua pihak untuk mengirimkan email jauh sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir

Kriteria Penyeleksian

Usul akan dievaluasi oleh sebuah panel beranggotakan staf program ERA, perwakilan BAPPENAS dan BAPPEDA, dan perwakilan Pemda. Kriteria penyeleksian adalah sebagai berikut:

Pendefinisian jelas atas penerima manfaat sasaran, yang memperlihatkan membutuhkan dukungan dari program	25 poin
Desain teknis dan kesesuaian dengan spesifikasi baku	15 poin
Metodologi pelaksanaan, rasionalitas kegiatan rencana kerja	20 poin
Pengalaman dan kredibilitas LSM atau CSO dengan kemampuan kelembagaan untuk melaksanakan proyek yang diusulkan	25 poin
Kelayakan biaya usul anggaran	15 poin
JUMLAH POIN	100 Poin

Program akan menyerahkan dana hibah kepada usul yang meraih jumlah poin terbanyak, dengan jumlah maksimal yang tersedia dalam program hibah.

Kesepakatan dan Pembayaran

Setelah penyerahan dana hibah, UNDP akan mengadakan Nota Kesepakatan Hibah (MOU) dengan lembaga, di mana contohnya dapat diperoleh dari situs web UNDP Indonesia di <http://www.undp.or.id/earthquake/index.asp> atau ERA Programme Office.

Pembayaran hibah akan dilakukan dalam satu/ dua tahap, yaitu tergantung pada bentuk dan jadwal kegiatan. Jumlah sebesar 10% akan ditahan sampai perampungan kegiatan secara tuntas dan keberterimaan UNDP atas laporan akhir.

Monitoring dan Pelaporan:

UNDP akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memonitor progres mitra penanggung jawab. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi: rapat pembahasan dengan mitra penanggung jawab untuk membahas progres, membicarakan tantangan dan tindakan untuk mengatasinya, dan menetapkan tindak korektif yang perlu dilakukan selama implementasi; Kunjungan Monitoring Lapangan untuk memvalidasi keluaran-keluaran di lapangan; Membahas dan Memvalidasi Laporan Kemajuan Mitra; dan Membahas laporan keuangan untuk memastikan bahwa pengeluaran sudah sesuai dengan mata anggaran yang disebutkan dalam MOU dan sudah sesuai dengan maksud-maksud dari MOU.

Lembaga penerima hibah akan disyaratkan untuk menyerahkan laporan akhir naratif dan keuangan sebelum pembayaran terakhir. Laporan tersebut akan memuat hasil, tantangan yang dihadapi dan hikmah pembelajaran, serta dokumentasi fotografis dari kegiatan dan keluaran proyek. Laporan keuangan akan memuat laporan pengeluaran atas anggaran. Penerima hibah mesti memelihara akun, catatan informasi dan dokumentasi pendukung untuk semua pengeluaran yang dibiayai oleh Program, dan UNDP mencadangkan hak untuk meninjau ulang dokumentasi pendukung tersebut. Penerima hibah juga mesti menyelenggarakan inventaris lengkap atas peralatan dan aset yang diadakan dengan dukungan yang disalurkan lewat program.

Pengeluaran apa pun yang tidak sejalan dengan tujuan, keluaran dan kegiatan LOA dapat ditolak oleh UNDP. Demikian juga dengan segala pengeluaran yang tidak dilengkapi dokumentasi pendukung akan ditolak oleh UNDP di mana jumlah ini akan ditelusuri dari laporan pengeluaran Mitra Penanggung Jawab.

Format laporan akan disediakan kepada penerima hibah.

Keterangan Lebih Lanjut:

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai proses pengajuan usul, materi yang mesti dimuat dalam usul atau hal lainnya yang berkaitan dengan Program Bantuan Pemulihan Awal (ERA), silakan hubungi UNDP ERA Programme Office di kontak tersebut di atas.

* * * * *

LAMPIRAN – 1

RESPONS ATAS BENCANA GEMPA BUMI DI INDONESIA

Early Recovery Cluster



Shelter & Reconstruction



Emergency Shelter Cluster



Kerangka Strategis untuk Kegiatan Rekonstruksi

1 Latar Belakang

- 1.1 Dokumen ini mewakili sikap Masyarakat Internasional dan organisasi-organisasi nasional dalam kaitannya dengan ketahanan papan (*shelter security*) korban bencana alam di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Dokumen ini berlandaskan pada opini pakar dan pengalaman kelembagaan anggota 'Gugus Pemulihan Awal' dan 'Gugus Hunian Darurat'. Jumlah total anggota kedua Gugus mencapai lebih dari 60 orang dan lebih jauh mewakili kebulatan pendapat dari mayoritas organisasi dan lembaga operasional nasional dan internasional yang sekarang sedang menyelenggarakan bantuan rumah di kedua daerah tersebut.
- 1.2 Kedua Gugus tetap mengitikadkan bahwasanya kegiatan masing-masing anggotanya mesti tetap berada dalam koridor untuk mendukung dan berselaraskan dengan kebijakan rencana jangka panjang Pemerintah Pusat pada level nasional dan Pemerintah Provinsi Jateng dan DIY, yaitu menyalurkan kepada masyarakat bantuan perumahan yang aman, melindungi dan tahan lama.

2 Tantangan yang Dihadapi

- 2.1 Memanfaatkan secara optimal sumber daya nasional, internasional dan swasta yang terbatas dan bergerak secepat mungkin ke fase rekonstruksi permanen niscaya mendesak, akan tetapi kebutuhan yang lebih mendesak adalah menyelenggarakan konstruksi dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada keluarga korban bencana yang tanpa rumah cikal sebelum musim hujan tiba pada Oktober 2006.
- 2.2 Walaupun pengadaan darurat selama beberapa bulan terakhir ini berhasil secara nyata meningkatkan *shelter security* penduduk, tidak dapat dipungkiri bahwa pengadaan yang serba terbatas itu tidak akan mencukupi untuk dapat menjawab kebutuhan pada musim hujan. Gambar A menyajikan hunian darurat yang khas dengan kualitas rendah dan ruang gerak dan keleluasaan pribadi yang terbatas dan yang menyisakan sedikit atau tidak sama sekali martabat keluarga. Selain itu, potensi bagi keluarga untuk kembali ke kegiatan ekonomi rumah tangga menjadi sangat terkendala.

Gambar A Hunian darurat berkualitas rendah di Dusun Trimurti Celan



- 2.3 Kedua Pemprov mencanangkan untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana untuk konstruksi rumah tembok yang diperkuat dengan beton bertulang secara gotong royong dan di bawah pengawasan. Desain dan penggunaan beton bertulang dalam perumahan permanen diakui sebagai unsur penting dalam menjamin kualitas bangunan yang mampu menanggulangi risiko di masa mendatang, tetapi kedua Gugus berpendapat bahwasannya tidak tersedia waktu yang cukup untuk merampungkan perumahan dengan bahan bangunan dan teknik tersebut sebelum musim hujan tiba.
- 2.4 Walaupun banyak keluarga korban bencana yang dapat bertahan hidup selama musim hujan dengan hunian seadanya, banyak kelompok rentan yang tidak akan dapat bertahan; terutama balita, manula, dan mereka yang sedang sakit. Selain itu, lantaran skala dari bencana itu sendiri, tidak ada jaminan bahwa menerapkan kebijakan penyasaran dengan sumber daya perumahan yang terbatas bakal menjawab kebutuhan akan hunian dari semua kelompok rentan di semua kabupaten atau akan memenuhi standar minimum internasional untuk bantuan kemanusiaan di bidang hunian sementara.
- 2.5 Berbagai respons di bidang hunian sementara yang diselenggarakan belakangan ini di lokasi lainnya di Asia Tenggara meneguhkan hubungan antara hunian yang buruk dan kesehatan masyarakat yang buruk, yaitu dengan meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat berbulan-bulan menetap di tempat tinggal yang terlalu padat dan lembab.
- 2.6 Selain itu, kegiatan penanganan bencana belakangan ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara hunian yang buruk dan kapasitas yang berkurang untuk kembali ke kegiatan ekonomi rumah tangga. Kapasitas yang berkurang ini diperkirakan akan terjadi pada tahapan genting dari siklus pemulihan ekonomi kedua daerah pascabencana dengan akibat berkurangnya kemampuan penduduk korban untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekonstruksi secara lepas dari mekanisme bantuan eksternal. Hal ini lantas diperkirakan bakal meningkatkan beban anggaran Pusat dan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

3 Kebijakan Rekonstruksi Pemerintah

- 3.1 Kedua Pemprov telah mendata kerusakan rumah di masing-masing daerah berdasarkan klasifikasi rumah hancur, rumah rusak berat dan rumah rusak ringan. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Gambar B Data Tingkat Kerusakan Rumah

	Provinsi		
	Yogyakarta	Jawa Tengah	Jumlah
Rumah hancur & Rumah rusak berat	206.000	97.330	303.330
Rumah rusak ringan	170.643	98.552	269.195

- 3.2 Menyusul pengumuman dari Pusat tentang berakhirnya fase tanggap darurat, kedua Pemprov mencanangkan untuk langsung beralih ke rekonstruksi permanen. Masing-masing Pemprov menyerahkan usul pembangunan kembali yang menggunakan model perumahan yang berbeda, jumlah total nilai yang berbeda, dan mekanisme penyelenggaraan yang berbeda pula.
- 3.3 Pemprov DIY mencanangkan program pembangunan rumah secara gotong royong dan berbantuan dengan sasaran 47.000 unit rumah per akhir 2006 yang menjadi fase pertama rekonstruksi. Sasaran pada fase pertama tersebut adalah keluarga yang paling rentan dan dengan rumah hancur dan rumah rusak berat. Program ini akan menggunakan bantuan berupa dana dan/ atau bahan bangunan untuk pembangunan rumah dasar³. Menurut rencana bantuan pembangunan rumah dasar akan dikucurkan dalam tiga kelompok (*tranche*) masing-masing senilai Rp5 juta, sehingga total berjumlah Rp15 juta, dimana kelompok pertama direncanakan untuk Agustus atau September dan kelompok kedua pada November atau Desember. Pendampingan teknis dicanangkan untuk disalurkan pada tingkat desa. Belum ada rencana untuk membantu mereka dengan rumah rusak ringan.
- 3.4 Pemprov Jateng juga mencanangkan untuk menyelenggarakan program pembangunan rumah secara gotong royong dan berbantuan menggunakan bantuan dana tunai. Dana ini digunakan untuk membangun struktur dan atap rumah saja dan sifatnya lebih terbatas daripada usul Pemprov DIY. Pemprov Jateng akan mengucurkan dana tunai ke semua 97.300 kepala keluarga korban bencana dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama sebesar Rp4,4 juta yang dikucurkan segera dan kelompok kedua sebesar Rp4 juta yang dikucurkan pada 2007, sehingga jumlah total mencapai Rp8,4 juta. Selain itu dialokasikan bantuan dana tunai senilai Rp0,5 juta bagi mereka dengan rumah rusak ringan. Menurut rencana juga akan diberikan pendampingan teknis di desa-desa.
- 3.5 Kedua Gugus menetapkan ada empat kendala pada strategi-strategi yang diajukan oleh kedua Pemda sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.1 – 3.4. Kendala-kendala ini telah dibahas pada tingkat pusat dan daerah dan hasilnya diuraikan di bawah ini:
- 3.5.1 Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan dana, mengadakan BBR, memberi pendampingan teknis, dan menyelenggarakan proses konstruksi rumah dasar maupun struktur dan atap rumah berakibat sebagian besar perumahan tidak akan selesai dibangun sebelum musim hujan tiba sehingga kebutuhan mayoritas penerima bantuan akan shelter tidak akan terjawab.
- 3.5.2 Belum ada rencana untuk sebelum musim hujan tiba membantu penduduk korban bencana selain dari mereka yang masuk kategori 'paling rentan' di DIY yang ditetapkan akan menerima bantuan rumah dalam kelompok pertama pembayaran dana.

³ Silakan rujuk ke kertas kebijakan mengenai perumahan dan rekonstruksi yang diterbitkan oleh Pemda Jateng dan DIY.

- 3.5.3 Pemprov Jateng dengan tepat menetapkan adanya kelompok-kelompok rentan dalam penduduk korban bencana dengan rumah rusak ringan. Sikap ini makin dikukuhkan oleh temuan-temuan 'Shelter and Vulnerability Assessment Survey' yang pada Juli 2006 dilaksanakan oleh Gugus Hunian Darurat, yang mendapatkan banyak keluarga bertempat tinggal dalam hunian darurat karena menilai rumah mereka yang rusak ringan tidak aman lagi untuk menanggung gempa kedua. Sejumlah rumah rusak ringan dapat diperbaiki tanpa biaya kapital yang besar, sementara yang lain perlu direkonstruksi secara menyeluruh. Hal ini menjadikan jumlah KK 'berisiko' membengkak menjadi 303.330 tanpa adanya kebulatan kebijakan tentang cara menanggulangi kenaikan ini.
- 3.5.4 Perbedaan dalam desain rumah dan jumlah total rencana bantuan di antara kedua Provinsi berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan sosial antarpenerima manfaat dan reaksi-reaksi terkait dalam implementasi strategi.
- 3.6 Temuan-temuan yang disebut dalam bagian 2 dan 3 menunjukkan perlu dipikirkannya kembali bagaimana sumber daya rekonstruksi dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil terbaik.

4 Atap Dulu

- 4.1 Dengan menyalurkan sumber daya untuk membangun atap yang kukuh keluarga mendapat solusi hunian sementara yang menawarkan lebih daripada tenda tetapi kurang daripada rumah⁴. Struktur atap menggunakan bahan bangunan yang sudah tersedia dan dapat dibangun secara cepat (dalam hitungan hari alih-alih minggu atau bulan) dan secara aman oleh masyarakat sendiri dengan hanya sedikit sumber daya eksternal (bahan bangunan, pendampingan teknis).
- 4.2 Model rekonstruksi serupa sukses dilaksanakan secara kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Internasional di sejumlah daerah yang baru-baru ini juga terkena bencana alam, utamanya di Sri Lanka dan Pakistan pada 2005.
- 4.3 Memanfaatkan sumber daya untuk konstruksi atap adalah satu-satunya solusi yang dapat dilaksanakan berdasarkan proyeksi waktu pengalokasian dana, penyaluran dan konstruksi guna menjawab seluruh kebutuhan akan hunian di kedua daerah sebelum musim hujan tiba.
- 4.4 Dengan menyediakan bahan bangunan dan pendampingan teknis untuk konstruksi atap mendahului komponen lain dari rumah batu tidak menggerus ketersediaan sumber daya untuk rekonstruksi pada masa mendatang, karena seluruh bahan bangunan yang dipakai dalam konstruksi atap akan dipergunakan kembali pada saat kepada keluarga diserahkan komponen lain secara lengkap untuk membangun rumah batu. Contohnya, struktur vertikal yang terbuat dari bambu untuk menopang atap dapat dipergunakan kembali pada rumah batu sebagai partisi internal atau untuk memperpanjang atap itu sendiri. Lembar plastik pada konstruksi atap sementara dapat dipakai sebagai pelapis tahan lembab pada lantai atau sebagai pelapis tahan air pada serambi atau dapur eksternal di rumah batu. Alat-alat yang dibagikan dapat digunakan pada saat konstruksi struktur atap maupun pada saat fase-fase pengembangan menjadi rumah batu.
- 4.5 Membangun bangunan sementara supaya tersedia atap yang durabel sebagai perlindungan selama musim hujan sudah dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari data survei yang dikumpulkan dari Emergency Shelter Cluster Survey⁵. Dengan demikian, strategi ini memanfaatkan mekanisme-mekanisme pelaksanaan yang sudah ada di kedua daerah tersebut.
- 4.6 Terakhir, pengadaan sumber daya untuk membangun struktur atap bersifat mendukung dan memfasilitasi proses rekonstruksi karena keluarga dimungkinkan untuk kembali

⁴ Konstruksi struktur atap TIDAK sama dengan hunian sementara atau barak yang dilaksanakan di Provinsi NAD pada 2005.

⁵ Shelter Vulnerability Survey dilaksanakan pada minggu pertama Juli 2006. Hasil survei telah diterbitkan dan tersedia di IFRC, Emergency Shelter Cluster Lead, nbauman@gmail.com.

menjalani kehidupan rumah tangga dan mengurus kegiatan ekonomi rumah tangga yaitu karena tersedianya rumah dalam tempo yang paling singkat namun masih dalam batas-batas yang layak.

5 Kerangka Kerja

5.1 Masyarakat yang berbeda dengan kemampuan sumber daya yang berbagai-bagai akan menyelenggarakan solusi struktur atap dan hunian sementara yang berbagai-bagai pula dalam rangka menjawab kebutuhan masing-masing. Tiap-tiap sumber daya eksternal yang dikomitmen mesti mempertimbangkan kepelbagaian tersebut. Oleh karena itu alih-alih mengusul satu desain tunggal Gugus menawarkan suatu kerangka pelaksanaan. Kerangka yang final mesti digodok lewat pembahasan dengan pemerintah di pusat maupun daerah. Sementara itu, Gugus Pemulihan Awal telah mencapai kebulatan pendapat mengenai sejumlah spesifikasi dasar yang sifatnya melandasi kerangka kerja untuk struktur atap yang sudah ada⁶. Spesifikasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Gambar C Kriteria Desain Atap/ Struktur pada Fase Pertama⁷

Indikator	Standar
Ruangan dalam rumah	Setidaknya 4,5m ² per orang, denah lantai seluas 18m ² untuk lokasi yang dibatasi lingkungan dan 24m ² untuk yang tidak dibatasi lingkungan
Ventilasi dan suhu udara	Desain hunian mesti memiliki ventilasi yang memadai, dan meminimalkan suhu dalam ruangan
Perlindungan dari cuaca	Desain hunian mesti memberikan perlindungan terhadap hujan, termasuk air hujan yang tertiuap angin
Tinggi atap	Minimal 2 meter dari permukaan tanah sampai lis
Keawetan	Bahan bangunan dan konstruksi mesti dapat digunakan selama 24 bulan
Keleluasaan pribadi	Setidaknya ada satu partisi yang menciptakan setidaknya dua ruangan
Biaya atap ⁸	Rp700.000 – 1.800.000 (80-200 USD)
Keselamatan	Konstruksi hunian mesti tahan terhadap angin kencang dan gempa bumi
Desain atap	Desain atap bergenteng
Fleksibel/ efisien	Sedapat mungkin bahan bangunan mesti dapat digunakan kembali
Pertimbangan budaya dan iklim	Bahan bangunan dan teknik pembangunan yang dipakai sudah dikenal oleh penerima manfaat
Lokasi	Hunian sementara mesti dibangun di atau sekitar pekarangan rumah
Kesehatan masyarakat – pembuangan air	Tempat pembuangan air dan konstruksi lantai yang memadai guna meminimalkan risiko banjir
Partisipasi masyarakat	Pembangunan dilakukan secara gotong royong
Ramah lingkungan	BBR mesti berasal dari sumber yang ramah lingkungan
Kepatuhan terhadap standar minimum bantuan kemanusiaan	Mematuhi atau menyediakan fasilitas yang lebih baik daripada standar SPHERE untuk pengadaan hunian sementara ⁹

⁶ Pada waktunya kerangka ini akan dikembangkan secara substansial sehingga melingkupi kajian, implementasi, pelatihan, pengadaan bahan bangunan, informasi manajemen, kajian kerentanan, monitoring, indikator lintas sektoral dan tolok ukur kualitatif lainnya bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam Gugus.

⁷ Kerangka Kerja adalah hasil pengembangan Early Recovery Shelter and Reconstruction Strategic Advisory Group yang melewati pembahasan oleh para anggota Gugus.

⁸ Ini adalah biaya 'jadi', dan meliputi biaya untuk pelatihan dan peralatan namun tidak biaya overhead lembaga.

⁹ 'Standar SPHERE' adalah sebuah dokumen konsensus yang memuat tolok ukur dan indikator terkait respons kemanusiaan dan sudah diterbitkan oleh IFRC.

5.2 Contoh atap sesuai kriteria desain atap disajikan pada Gambar D di bawah ini.

Gambar D Contoh Struktur Atap¹⁰



Catatan: penyiapan fondasi berjalan seiring dengan konstruksi atap

6 Advokasi sikap Gugus terhadap Kebijakan Rekonstruksi Pemerintah

- 6.1 **Pemerataan dan pencakupan beban kasus.** Gugus mengadvokasi Pemda untuk mempertimbangkan untuk mengalokasikan minimal Rp1 juta dari kelompok (*tranche*) pertama dari sumber daya mereka yang dialokasikan untuk rekonstruksi agar disalurkan secara merata kepada semua KK korban bencana alam dengan rumah hancur dan rumah rusak berat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan struktur atap secara gotong royong. Dengan demikian, dana sebesar Rp1 juta mesti disalurkan secepatnya kepada ke-303.330 KK korban bencana alam di kedua daerah agar supaya pengadaan dan pembangunan dapat rampung sebelum musim hujan tiba. Sisa jumlah dari hibah kelompok pertama untuk kedua daerah dapat disalurkan pada kemudian hari, atau secara bersamaan, untuk rekonstruksi permanen yang dicanangkan itu. Strategi ini telah dipresentasikan dan dibahas dengan badan perencanaan kedua daerah dan Departemen Pekerjaan Umum serta National Technical Committee.
- 6.2 **Modal yang ditanam tetap utuh.** Strategi ini tidak akan berdampak pada bantuan rumah secara keseluruhan, karena semua bahan bangunan yang disalurkan untuk struktur atap

¹⁰ Rujukan: Program hunian sementara IFRC. Silakan hubungi IFRC untuk uraian lebih selengkapnya mengenai struktur atap ini.

akan digunakan kembali pada pembangunan tempat tinggal permanen. Dengan cara ini sumber daya yang disiapkan untuk rumah permanen tidak berkurang.

- 6.2 **Pendampingan teknis dan mobilisasi berbantuan.** Seperti yang sudah ditetapkan, sumber daya dibutuhkan untuk menyalurkan pendampingan teknis pada pembangunan struktur atap dan untuk mobilisasi masyarakat di desa-desa. Berdasarkan pengalaman dari program-program pembangunan atap yang pernah dilakukan, Gugus mengusulkan untuk diterjunkannya dua fasilitator untuk tiap 30-50 KK dengan masa tugas antara satu sampai dua minggu di masing-masing lokasi. Menurut prakiraan kasar, sekitar 2-3 ribu fasilitator akan diperlukan untuk kedua daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan atap untuk setiap KK korban bencana alam sebelum musim hujan tiba. Para fasilitator yang akan dikaryakan dapat diperbantukan dari dinas-dinas provinsi kedua daerah, perguruan tinggi, anggota Gugus, LSM lokal, dan elemen akar rumput. Mereka nantinya juga dapat diperbantukan untuk membantu kegiatan rekonstruksi permanen.
- 6.3 **Manajemen data, perencanaan strategis, pelacakan & monitoring sumber daya.** Beban tugas manajemen data untuk melacak distribusi sumber daya dan memonitor pelaksanaan dapat dibagi antara Gugus Pemulihan Awal dan dinas-dinas provinsi. Hal ini akan memastikan terjadinya pemrioritasan distribusi sumber daya, suatu mekanisme monitoring yang lebih kuat untuk menjamin *shelter security* kelompok-kelompok rentan dan koordinasi menyeluruh yang lebih baik di antara program-program daerah dan para anggota Gugus yang juga sedang menyalurkan bantuan hunian sementara dan rumah kepada KK korban bencana alam. Gugus Pemulihan Awal sudah menyerahkan usul tersebut kepada badan perencanaan kedua daerah dan sekarang tengah dibahas.
- 6.4 **Mendukung upaya rekonstruksi permanen yang diselenggarakan secara unilateral dan swadaya.** Mereka dengan sumber daya milik sendiri melaksanakan pembangunan rumah permanen memakai semen dan bahan bangunan berat. Dalam hal ini sangat penting bagi Pemerintah dan Gugus untuk menggalakkan dan mendukung pendampingan teknis dan kesadaran masyarakat mengenai desain dan teknik bangunan yang aman. Hal ini kiranya berlangsung bersamaan dengan kegiatan pembangunan atap.
- 6.5 **Mendukung masyarakat korban bencana alam di daerah perkotaan.** ESCG Shelter and Vulnerability Survey menemukan adanya kebutuhan yang cukup nyata akan hunian yang belum terjawab di daerah perkotaan. Gugus Pemulihan Awal belum menetapkan langkah terbaik dalam kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan sumber dayanya untuk membantu mereka bekerja sama dengan Pemda kedua daerah. Gugus ingin mengajak Pemerintah Pusat dan Daerah membahas langkah-langkah terbaik dalam menjawab kebutuhan tersebut.
- 6.6 **Bantuan Rumah bagi mereka dengan rumah rusak ringan.** Isu kelompok-kelompok rentan dengan rumah rusak ringan perlu dipikirkan secara lebih matang lagi. Beberapa rumah rusak ringan dapat diperbaiki dengan pengeluaran kapital yang minimal yang dapat secara nyata meningkatkan *shelter security* bagi KK korban bencana alam. KK lainnya yang tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan perbaikan secara swadaya menghadapi risiko yang sama, atau lebih besar, dengan mereka yang tidak memiliki rumah, seandainya gempa bumi kembali melanda sebelum sempat dilakukan perbaikan.

7 Dukungan Gugus kepada Pemerintah Pusat dan Daerah

- 7.1 Besaran kebutuhan akan hunian adalah luar biasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei kajian kebutuhan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh ESCG serta data yang dikumpulkan oleh para anggota Gugus selama 2 bulan terakhir semenjak survei Pemda, dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan hunian adalah lebih besar dibandingkan dengan angka-angka yang dilaporkan sebelumnya. Prakiraan konservatif mengindikasikan adanya tambahan 83.355 KK yang membutuhkan struktur atap sebelum musim hujan tiba selain ke-303.330 rumah yang tergolong dalam kategori rumah hancur dan rumah rusak berat, sehingga jumlah total menjadi 386.685 rumah¹¹.

¹¹ Silakan hubungi Gugus Pemulihan Awal UNDP, Yogyakarta, untuk keterangan lebih lanjut (pete.manfield@undp.org).

- 7.2 Bagian terbesar sumber daya untuk bantuan rumah akan bersumber dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Gugus hanya dapat memberikan sebagian dari kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk menangani pembangunan atap bagi penduduk korban bencana alam. Hanya saja, kendala waktu sekarang telah menjadi sama mendesaknya dengan ketersediaan sumber daya, sehingga jelas bahwa lembaga-lembaga pelaksana dalam Gugus yang sedang menyelenggarakan kegiatan pembangunan atap membutuhkan dukungan.
- 7.3 Gambar C menyajikan sumber daya yang sudah dan akan diserahkan oleh para anggota Gugus selama 2006 dan sebelum musim hujan tiba. Jumlah bantuan bangunan atap yang sudah dikomitmen mencapai 59.146 unit yang menutup sekitar 19,4% dari jumlah total rumah yang termasuk kategori hancur dan rusak berat. Masing-masing lembaga tengah berupaya untuk menjawab seluruh kebutuhan akan bangunan atap menggunakan dasar 'dusun per dusun'. Hal ini dipastikan akan memfasilitasi keterpaduan dengan perencanaan dan alokasi sumber daya Daerah.

Gambar E Kontribusi Gugus terhadap Konstruksi Bangunan Atap

Anggota Gugus	Bangunan Atap yang Diserahkan/ Diikat Janji (Unit)
ADRA	1000
AusAid	5000
CCF	1300
CHF	5000
Cordaid	4000
CWS	2452
Emergency Architects	300
FHI	40
GenAssist	1543
GRC	8000
IFRC	17000
IOM	5000
JRS	1000
Muslimaid	300
OXFAM	2800
SRC	2000
World Relief	711
UNDP	2000
Jumlah	59.446

- 7.4 Gugus juga akan menjajaki cara lain dalam menyalurkan sumber daya dan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan rekonstruksi. Topik-topik yang dicakup:
- manajemen data, pembagian informasi
 - pelacakan dan analisis strategis untuk pemrioritasan penyaluran sumber daya
 - monitoring kelompok-kelompok rentan
 - pendampingan teknis untuk konstruksi bangunan atap
 - pengalakkan desain bangunan yang aman, termasuk ketahanan rumah permanen terhadap gempa bumi

LAMPIRAN – 2

LEMBAR ISIAN PERMOHONAN DANA DANA KECIL UNTUK KEGIATAN LSM/ CSO DI BIDANG HUNIAN DI D.I. YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

1. Informasi Kontak:

Nama Lembaga:	
Nama Contact Person:	
Alamat:	
Telepon:	
Fax:	
E-mail:	

2. Latar Belakang Masyarakat Sasaran:

Provinsi:	
Kabupaten:	
Kecamatan:	
Desa:	
Lainnya: <i>tergantung pada kekhususan masyarakat untuk menjelaskan lokasi</i>	
Jumlah hunian sasaran yang akan didukung:	
Jumlah KK penerima manfaat yang disasar/ jumlah orang:	_____ KK _____ jiwa
Uraian mengenai penerima manfaat sasaran, , dan eksistensi ormas saat ini	
Uraian mengenai kerusakan atas perumahan dan infrastruktur (infrastruktur rumah tangga, masyarakat dan publik)	
Jenis bantuan yang telah diterima penerima manfaat sasaran atau di dalam wilayah sasaran	
Latar belakang pemikiran dipilihnya penerima manfaat sasaran	

3. Hasil yang diharapkan dari proyek:

Jelaskan hasil yang diharapkan (Tujuan, Maksud dan Keluaran) dari proyek yang diusulkan:

Sasaran:	
Maksud:	
Keluaran:	1. 2. 3.

4. Uraian, Gambar Teknis, Spesifikasi, dan Ketentuan Bahan Bangunan

Berikan uraian mengenai hunian sementara, termasuk gambar teknis, spesifikasi, dan ketentuan bahan bangunan (rincian dapat dilampirkan sebagai lampiran – 2)

5. Metodologi Pelaksanaan

Jelaskan secara singkat metodologi yang diterapkan lembaga dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan.

6. Kegiatan/ Rencana Kerja:

Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek? Mohon jelaskan sekonkret mungkin. Jelaskan secara ringkas bagaimana kegiatan akan diselenggarakan. Sajikan jadwal kegiatan yang direncanakan dalam bentuk bar-chart.

Kegiatan	Bulan		
	1	2	3
<i>Keluaran 1</i>			
Kegiatan 1.1	X		
Kegiatan 1.2	X	X	
Kegiatan 1.3		X	X
<i>Dsb.</i>			

7. Masukan-masukan:

Jelaskan masukan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil-hasil proyek yang diharapkan, termasuk keterangan rinci mengenai masukan pelatihan, bahan dan peralatan, hibah tunai, dan masukan lainnya. Masukan-masukan ini mesti dinyatakan dalam anggaran proyek..

Biaya apa saja yang akan didanai?

Semua biaya yang wajar dan perlu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas akan dipertimbangkan, dengan pengecualian sebagai berikut:

- Dana modal atau rutin untuk konstruksi infrastruktur publik atau pembelian barang modal; dan
- Kegiatan yang bersifat amal, pendidikan umum, beasiswa, widyawisata atau fellowship.

8. Monitoring dan Evaluasi:

Jelaskan secara singkat proses monitoring, pelaporan dan evaluasi pada proyek. Sertakan keterangan yang menjelaskan bagaimana masyarakat akan dilibatkan dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

9. Kemampuan Keorganisasian:

Jelaskan secara singkat organisasi yang mengajukan usul. Selain itu, mohon beri jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah organisasi berbadan hukum?
2. Tanggal pendirian:
3. Apakah organisasi memiliki badan pengatur? Mohon jelaskan.
4. Apakah organisasi adalah bagian dari jejaring LSM tertentu?
5. Apakah organisasi menerima dana dari Pemerintah, lembaga nasional atau internasional (termasuk PBB)?
6. Uraikan proyek-proyek yang pernah dikerjakan dalam kaitannya dengan pencapaian indikator-indikator keberhasilan yang relevan.
7. Apakah organisasi memiliki rekening bank tersendiri?

8. Uraikan kemampuan keuangan organisasi, misal dana di tangan, kredit, omset tahunan, sistem keuangan.
9. Mohon sertakan surat dari pemerintah setempat (kepala desa, mengetahui camat) yang menerangkan bahwa pemerintah setempat mengetahui kegiatan organisasi untuk menyalurkan bantuan di bidang tertentu.

10. Pengalaman Keorganisasian:

Mohon senaraikan proyek-proyek terdahulu dalam format sebagai berikut:

Nama proyek	Sumber dana	Nilai kontrak	Periode kegiatan	Bentuk kegiatan yang dilakukan	Referensi dari sumber pendanaan/ pengawas proyek
Dst.					
Dst.					

11. Penandatanganan Proposal

Usul mesti disetujui dan ditandatangani sebagai berikut:

Usul ditandatangani untuk dan atas nama oleh wakil yang berwenang

(Nama Organisasi)

Tanda Tangan/Cap Organisasi/Tanggal

Nama perwakilan:

Alamat:

Telepon/Fax:

Lampiran 1 pada Usul: Kerangka Logis

Lengkapi tabel di bawah ini dengan hasil dan kegiatan usul teknis.

Hasil	Indikator berdaya uji	Metode verifikasi	Asumsi/ risiko
Tujuan ...			
Maksud
Keluaran 1... 2... 3...
Keluaran 1 Kegiatan 1.1 Kegiatan 1.2 Kegiatan 1.3	Keluaran 1	Keluaran 1
Keluaran 2 Kegiatan 2.1 Kegiatan 2.2 Kegiatan 2.3	Keluaran 2	Keluaran 2	
Dsb.			

Lampiran 2 pada Usul: Uraian, Gambar Teknis, Spesifikasi, dan Ketentuan Bahan Bangunan per Unit.

- 2.1. Uraian Hunian
- 2.2. Technical Design and Drawings Desain dan Gambar Teknis
- 2.3. Spesifikasi
- 2.4. Kebutuhan Bahan Bangunan per Unit

Lampiran 3 pada Usul: Usul Anggaran

Lengkapi atau salin lembar anggaran di bawah ini. Mohon untuk juga menyertakan keterangan tambahan yang Anda yakini dapat berguna dalam mengevaluasi permohonan Anda. Perhatikan bahwa program dana hibah kecil akan mendanai kegiatan masing-masing hingga jumlah maksimum Rp250,000,000. Perhatikan bahwa Biaya Minimum Bahan Bangunan (termasuk untuk Hunian Sementara/ Atap, Toolkit, dan Peralatan) tidak boleh lebih kecil daripada 80% dari jumlah total usul.

	Harga Satuan	Volume	Uraian	Volume	Uraian	Jumlah
Biaya Input Shelter						
Bahan Shelter/ Atap, Toolkit, Peralatan						
...						
...						
...						
Subjumlah						
Biaya Tenaga Kerja						
...						
...						
...						
Subjumlah						
Pelatihan/ Lokakarya						
...						
...						
...						
Subjumlah						
Kegiatan Lainnya						
...						
...						
...						
Subjumlah						
Biaya Pendukung Proyek						
Personel Proyek						
...						
...						
Subjumlah						
Biaya Transportasi/ Perjalanan/ Monitoring						
...						
...						
...						
Subjumlah						
Biaya Operasional & Kantor						
...						
...						
...						
Subjumlah						
SUBJUMLAH						
OVERHEAD (sebutkan persentase maksimal sampai 5%)		Persen:	5%			
JUMLAH						